

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi

Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

**Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi
Triwulan II Tahun 2026**

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Fasilitas, Koordinasi, dan Diseminasi di Bidang Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi yang Berkualitas</i>				
1.1	Indikator 1.1 Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	Jumlah	Rp7,23 Triliun	Rp2,66 Triliun	36,79%
1.2	Indikator 1.2 Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	Jumlah	Rp13,70 Triliun	Rp7,05 Triliun	51,46%
1.3	Indikator 1.3 Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	Jumlah	Rp19,06 Triliun	Rp4,92 Triliun	25,81%
1.4	Indikator 1.4 Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	Jumlah	Rp0,60 Triliun	Rp0,09 Triliun	15,00%
1.5	Indikator 1.5 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi yang Terselesaikan	Jumlah	2	1	50%
II	<i>Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas</i>				
2.1	Indikator 2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi	Indeks	3,1	3.28	105,86%
III	<i>Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Pelaksanaan Fasilitas, Koordinasi, dan Diseminasi di Bidang Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi</i>				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan II	Capaian (%)
3.1	Indikator 3.1 Persentase Penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Institusi Dalam dan Luar Negeri	Persentase	90%	68,58%	76,20%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Komunikasi Publik dan Promosi Investasi yang dihasilkan	Persentase	90%	80,88%	89,86%
3.3	Indikator 3.3 Persentase Dukungan terhadap Penyelenggaraan layanan Informasi Publik	Persentase	90%	53,00%	58,89%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi yang Baik				
4.1	Indikator 4.1 Indeks Tata Kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi	Indeks	3 (Skala 4)	3	100%

Kinerja Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1

Sasaran Program 1: Terwujudnya Fasilitasi, Koordinasi, dan Diseminasi di Bidang Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program, yaitu terwujudnya fasilitasi, koordinasi, dan diseminasi di bidang investasi, kerja sama, dan komunikasi yang berkualitas, yang dapat ditunjukkan dengan indikator nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei, nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang, nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik, dan nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe dan jumlah rekomendasi peningkatan iklim investasi yang terselesaikan.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Nilai PMA dan

PMDN di KEK Sei Mangkei

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei merupakan salah satu KEK berbasis industri pengolahan kelapa sawit yang berlokasi di Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. KEK ini menjadi kawasan strategis nasional dalam mendorong hilirisasi industri minyak kelapa sawit serta

pengembangan logistik di Sumatera. Keberadaan KEK Sei Mangkei didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah, ketersediaan infrastruktur kawasan, serta konektivitas yang terintegrasi dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan jaringan kereta api.

Dalam rangka mendorong percepatan investasi di KEK Sei Mangkei, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setjen Denas KEK) menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi, dan diseminasi informasi investasi kepada calon investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di kawasan sebagai indikator utama keberhasilan pengembangan KEK. Pada Tahun 2026, target nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei ditetapkan sebesar Rp7,23 triliun, mencerminkan ambisi pertumbuhan investasi yang berkelanjutan dan terukur di kawasan ini.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei	Jumlah	Rp7,23 Triliun	Rp2,66 Triliun	36,79%

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, serta dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di kawasan. Capaian kinerja ini selanjutnya diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dalam rangka peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, yang dihitung dalam sebuah formula sebagai berikut:

(Σ Capaian Investasi di KEK Sei Mangkei)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mendukung peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di KEK Sei Mangkei melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemetaan profil investasi, identifikasi hambatan investasi, serta fasilitasi dukungan kebijakan investasi di kawasan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Nilai PMA dan PMDN di KEK Sei Mangkei			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dukungan investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan Workshop ADB dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait
2	Identifikasi dan pemutakhiran data peluang investasi di KEK Sei Mangkei	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi dan pemutakhiran data peluang investasi di KEK Sei Mangkei dalam rangkaian Workshop ADB

Pada Triwulan II Tahun 2026, telah dilaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait pengembangan investasi di KEK Sei Mangkei melalui rangkaian kegiatan *Workshop ADB "From Enclaves to Ecosystems: Green, Digital, and Integrated SEZs in Economic Corridors Workshop"*. Kegiatan tersebut menjadi sarana koordinasi dan pertukaran

informasi dengan pemangku kepentingan terkait serta memberikan gambaran langsung mengenai perkembangan dan praktik pengembangan KEK Sei Mangkei.

Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi mengenai pengembangan klaster industri kelapa sawit dan karet, dukungan infrastruktur dan konektivitas kawasan dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan jaringan kereta api, penyediaan utilitas kawasan, serta strategi peningkatan investasi melalui penyediaan infrastruktur dan insentif. Selain itu, diperoleh informasi mengenai peluang pengembangan industri hilir berbasis kelapa sawit dan karet bernilai tambah serta posisi KEK Sei Mangkei dalam *IMT-GT Rubber City Network* yang menghubungkan KEK Sei Mangkei dengan Songkhla Rubber City di Thailand dan Kedah Rubber City di Malaysia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan rekomendasi peningkatan investasi di KEK Sei Mangkei adalah sebesar Rp313.892.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp1.758.500,00 atau sekitar 0,56% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Diversifikasi investor dan industri yang masih terbatas sehingga ketergantungan pada komoditas tertentu masih cukup tinggi.
2. Ketersediaan tenaga kerja terampil yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri.
3. Integrasi kawasan ke dalam rantai nilai regional dan global yang masih perlu diperkuat.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Mendorong diversifikasi industri hilir, khususnya pada sektor kelapa sawit dan karet bernilai tambah.
2. Mengembangkan pusat inovasi dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan mendukung inovasi industri.
3. Memperkuat pengembangan kawasan secara terpadu melalui peningkatan infrastruktur, tata kelola, logistik, dan pengembangan sumber daya manusia.

1.2 Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang berlokasi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, KEK ini dikembangkan dengan fokus utama pada industri pengolahan bauksit menjadi alumina dan aluminium, serta industri turunannya. Posisi strategis KEK Galang Batang yang berada di kawasan kepulauan dengan akses maritim yang baik menjadikannya sebagai salah satu destinasi investasi unggulan dalam mendukung program hilirisasi mineral nasional.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk aluminium dan semakin kuatnya komitmen pemerintah dalam mendorong nilai tambah dari sumber daya alam mineral, KEK Galang Batang memiliki peran strategis dalam rantai pasok industri pengolahan mineral nasional. Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Setjen Denas KEK berperan aktif dalam mengidentifikasi peluang investasi, memfasilitasi koordinasi dengan administrator kawasan, serta mendorong masuknya investor berkualitas ke kawasan ini. Target nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp13,70 triliun, sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem industri mineral nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang	Jumlah	Rp13,70 Triliun	Rp7,05 Triliun	51.46%

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, serta dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan

investasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di kawasan. Capaian kinerja ini selanjutnya diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dalam rangka peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, yang dihitung dalam sebuah formula sebagai berikut:

$$(\Sigma \text{ Capaian Investasi di KEK Galang Batang})$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mendukung peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di KEK Galang Batang melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemetaan profil investasi, identifikasi hambatan investasi, serta fasilitasi dukungan kebijakan investasi di kawasan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dukungan investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan meeting untuk mengidentifikasi isu penghambat investasi dan telah dilaksanakan juga pertemuan dengan All-China Environment Federation (ACEF) untuk mengenalkan KEK Galang Batang
2	Identifikasi dan pemutakhiran data	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Kriteria Lokasi

	peluang investasi di KEK Galang Batang		Usulan Perluasan KEK Galang Batang
--	---	--	---------------------------------------

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi dalam rangka mendukung pencapaian indikator Nilai PMA dan PMDN di KEK Galang Batang telah terlaksana. Upaya yang dilakukan difokuskan pada penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, identifikasi hambatan investasi, serta pemutakhiran informasi mengenai potensi dan peluang pengembangan kawasan.

Koordinasi dengan pemangku kepentingan telah dilakukan melalui meeting untuk mengidentifikasi berbagai isu dan hambatan yang berpotensi memengaruhi perkembangan investasi di KEK Galang Batang. Kegiatan tersebut menjadi forum untuk memperoleh informasi mengenai kondisi investasi terkini, perkembangan kegiatan usaha, serta kebutuhan dukungan yang diperlukan dalam rangka mendorong percepatan investasi. Hasil identifikasi tersebut selanjutnya menjadi bahan dalam menentukan tindak lanjut dan kebutuhan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, telah dilaksanakan pertemuan dengan All-China Environment Federation (ACEF) sebagai bagian dari upaya memperkenalkan KEK Galang Batang kepada calon mitra dan investor potensial. Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai potensi kawasan, peluang investasi, serta pengembangan kegiatan usaha yang dapat dikembangkan di KEK Galang Batang. Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas jejaring promosi investasi dan membuka peluang kerja sama yang dapat mendukung peningkatan investasi, khususnya PMA.

Dalam rangka mendukung pemutakhiran data dan pengembangan peluang investasi, juga telah dilaksanakan Rapat Konfirmasi Kriteria Lokasi Usulan Perluasan KEK Galang Batang. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh kejelasan mengenai kriteria dan kesesuaian lokasi yang diusulkan, sehingga informasi terkait pengembangan kawasan dapat menjadi lebih akurat dan dapat digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi potensi investasi ke depan. Pemutakhiran tersebut penting untuk memastikan bahwa peluang investasi yang ditawarkan kepada calon investor didukung oleh informasi lokasi dan pengembangan kawasan yang jelas.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tidak hanya diarahkan pada pemenuhan kegiatan koordinasi dan administrasi, tetapi

juga menjadi bagian dari upaya membuka peluang investasi baru, mengidentifikasi dan menindaklanjuti hambatan investasi, memperkuat promosi kawasan, serta meningkatkan kesiapan informasi investasi di KEK Galang Batang. Hasil koordinasi dan pemutakhiran data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan untuk menentukan langkah fasilitasi dan promosi investasi pada periode berikutnya dalam rangka mendorong peningkatan realisasi PMA dan PMDN di KEK Galang Batang.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan rekomendasi peningkatan investasi di KEK Galang Batang adalah sebesar Rp318.689.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp49.196.210,00 atau sekitar 15,44% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Dalam proses penyiapan perluasan kawasan, masih terdapat kendala terkait penggunaan sebagian kawasan hutan pada lokasi yang diusulkan. Berdasarkan hasil pembahasan, area yang ditandai dengan warna merah pada peta belum memperoleh persetujuan untuk dimanfaatkan. Namun demikian, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Tim Terpadu, terdapat rekomendasi pelepasan kawasan hutan seluas kurang lebih 50,12 hektare yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan oleh Kementerian Kehutanan.

Di sisi lain, GBKEK menyampaikan rencana pembangunan platform sebagai pelindung kawasan hutan mangrove sebagai bagian dari upaya menjaga fungsi lingkungan dalam pengembangan kawasan. Hal ini menunjukkan bahwa rencana pengembangan dan perluasan kawasan perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pengembangan investasi dengan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan kawasan.

Rencana pengembangan kawasan tersebut telah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga penyelesaian berbagai aspek pendukung, khususnya terkait status dan pemanfaatan kawasan hutan, menjadi penting untuk menjaga kelancaran pelaksanaan rencana pengembangan. Oleh karena itu, diperlukan tindak lanjut dan koordinasi secara intensif dengan kementerian/lembaga terkait, khususnya

dalam penyelesaian status kawasan hutan dan pemenuhan ketentuan yang diperlukan, sehingga proses perluasan KEK Galang Batang dapat segera memperoleh kepastian dan selanjutnya dapat mendukung pengembangan kawasan industri, pembangunan pelabuhan, serta peningkatan kapasitas investasi di kawasan.

1.3 Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 dan berlokasi di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. KEK ini difokuskan pada pengembangan industri pengolahan tembaga dan produk turunannya, dengan keunggulan lokasi yang berada di kawasan industri yang telah mapan, didukung infrastruktur logistik yang baik dan kedekatan dengan pusat ekonomi di Jawa Timur. KEK Gresik menjadi salah satu kawasan prioritas dalam agenda hilirisasi mineral strategis pemerintah, khususnya dalam pengolahan konsentrat tembaga yang sebelumnya diekspor mentah.

Besarnya potensi industri pengolahan tembaga yang memiliki multiplier effect tinggi terhadap perekonomian nasional menjadikan KEK Gresik sebagai kawasan yang sangat strategis dalam menarik investasi berskala besar. Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Setjen Denas KEK secara aktif menjalankan peran fasilitasi dan promosi investasi untuk mendorong realisasi PMA dan PMDN di kawasan ini, termasuk melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan administrator kawasan. Target nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp19,06 triliun, yang merupakan target terbesar di antara keempat KEK yang menjadi indikator kinerja utama Biro, mencerminkan skala dan kapasitas investasi yang besar di kawasan ini.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik	Jumlah	Rp19,06 Triliun	Rp4,92 Triliun	25,81%

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, serta dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan

investasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di kawasan. Capaian kinerja ini selanjutnya diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dalam rangka peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, yang dihitung dalam sebuah formula sebagai berikut:

(Σ Capaian Investasi di KEK Gresik)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk mendukung peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di KEK Gresik melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemetaan profil investasi, identifikasi hambatan investasi, serta fasilitasi dukungan kebijakan investasi di kawasan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Nilai PMA dan PMDN di KEK Gresik			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dukungan investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Pembahasan terkait Dampak KEK Gresik dengan BPS dan BUPP
2	Identifikasi dan pemutakhiran data peluang investasi di KEK Gresik	Terlaksana	Telah dilaksanakan Pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk Rencana Perluasan KEK Gresik dengan Setdukab dan ATR BPN dan Audiensi dengan pemerintah Kota Meishan

			China serta kegiatan Groundbreaking PT GEABH
--	--	--	---

Pada Triwulan II telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung percepatan investasi di KEK Gresik. Kegiatan meliputi koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui Rapat Pembahasan Dampak KEK Gresik bersama BPS dan BUPP guna memperoleh informasi dan masukan terkait perkembangan serta dampak keberadaan KEK Gresik.

Selain itu, telah dilakukan pemutakhiran informasi dan identifikasi peluang investasi melalui pembahasan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk rencana perluasan KEK Gresik bersama Setda Kabupaten Gresik dan ATR/BPN, audiensi dengan Pemerintah Kota Meishan, Tiongkok, serta kegiatan groundbreaking PT GEABH. Rangkaian kegiatan tersebut mendukung penguatan koordinasi, pemutakhiran informasi peluang investasi, serta peningkatan kesiapan pengembangan dan perluasan investasi di KEK Gresik.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan rekomendasi peningkatan investasi di KEK Gresik adalah sebesar Rp318.717.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp122.982.863,00 atau sekitar 38,59% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Data dan informasi terkait dampak keberadaan KEK Gresik masih belum tersedia secara cukup detail dan komprehensif, khususnya data yang dapat menggambarkan dampak KEK terhadap aspek ekonomi, investasi, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Kondisi tersebut menyebabkan proses analisis dan pengukuran dampak KEK Gresik belum dapat dilakukan secara optimal sehingga masih diperlukan

pemutakhiran serta pendalaman data bersama pemangku kepentingan terkait.

2. Perluasan KEK Gresik menghadapi hambatan utama berupa ketidaksesuaian sebagian lokasi usulan dengan RDTR dan RTRW Kabupaten Gresik, sehingga skema KKKPR tidak dapat diterapkan dan PKKPR hanya dapat mengakomodasi sebagian kecil dari total usulan 1.041,18 Ha. Di sisi lain, skema PKKPR kondisi tertentu masih perlu diverifikasi pemenuhan kriterianya, sementara skema RKKPR belum dapat digunakan karena lokasi perluasan belum berstatus PSN. Selain itu, masih terdapat potensi double licensing KKPR antara Badan Usaha KEK dan pelaku usaha di dalam kawasan yang perlu disederhanakan untuk mendukung percepatan investasi.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan II tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan pendalaman data bersama pengelola KEK, pemerintah daerah, K/L terkait, serta pelaku usaha untuk melengkapi dan memutakhirkan data dampak KEK Gresik, khususnya terkait investasi, tenaga kerja, aktivitas ekonomi, dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Data tersebut selanjutnya dihimpun dan dianalisis sebagai dasar pengukuran dampak keberadaan KEK.
2. Melakukan verifikasi dan pemetaan spasial secara lebih rinci terhadap kesesuaian lokasi usulan dengan RDTR dan RTRW, serta koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan pemangku kepentingan terkait untuk menentukan skema KKPR yang paling feasible, termasuk pendalaman opsi PKKPR kondisi tertentu. Selain itu, dilakukan identifikasi penyederhanaan proses KKPR untuk menghindari *double licensing* antara Badan Usaha KEK dan pelaku usaha di dalam kawasan.

1.4 Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 dan berlokasi di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. KEK ini dikembangkan di atas lahan bekas kilang LNG PT Arun yang pernah menjadi salah satu fasilitas LNG terbesar di dunia, sehingga memiliki warisan infrastruktur industri yang signifikan. Fokus pengembangan KEK Arun Lhokseumawe mencakup industri pengolahan gas dan petrokimia, logistik dan pergudangan, serta industri

pendukung lainnya yang memanfaatkan potensi energi dan posisi strategis kawasan di Selat Malaka.

Pengembangan KEK Arun Lhokseumawe juga memiliki dimensi sosial ekonomi yang penting bagi Provinsi Aceh, mengingat peran kawasan ini sebagai katalis pembangunan ekonomi daerah pascakonflik dan pasca-berakhirnya operasi Kilang LNG Arun. Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Setjen Denas KEK memiliki peran strategis dalam memfasilitasi masuknya investasi, melakukan pemetaan profil dan peluang investasi, serta mengidentifikasi hambatan yang perlu diselesaikan untuk meningkatkan daya tarik kawasan bagi investor. Target nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp0,60 triliun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe	Jumlah	Rp0,60 Triliun	Rp0,09 Triliun	15,00%

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, serta dukungan kebijakan dalam rangka peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan melalui kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait guna mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di kawasan. Capaian kinerja ini selanjutnya diukur berdasarkan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dalam rangka peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus, yang dihitung dalam sebuah formula sebagai berikut:

(Σ Capaian Investasi di KEK Arun Lhokseumawe)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut

bertujuan untuk mendukung peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di KEK Arun Lhokseumawe melalui pelaksanaan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk pemetaan profil investasi, identifikasi hambatan investasi, serta fasilitasi dukungan kebijakan investasi di kawasan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Nilai PMA dan PMDN di KEK Arun Lhokseumawe			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dukungan investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemangku BUPP dan Administrator KEK Arun Lhokseumawe
2	Identifikasi dan pemutakhiran data peluang investasi di KEK Arun Lhokseumawe	Terlaksana	Telah dilaksanakan identifikasi dan pemutakhiran data peluang investasi di KEK Arun Lhokseumawe

Pada Triwulan II telah dilaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka mendukung percepatan investasi di KEK Arun Lhokseumawe melalui koordinasi dan monitoring perkembangan kawasan serta kegiatan usaha pelaku usaha di kawasan. Kegiatan dilaksanakan melalui pembahasan perkembangan KEK Arun Lhokseumawe dan koordinasi dengan PT Pupuk Iskandar Muda terkait realisasi impor, rencana ekspor, serta perkembangan kegiatan usahanya.

Hasil monitoring dan koordinasi menghasilkan pemutakhiran informasi mengenai perkembangan dan peluang investasi di KEK Arun Lhokseumawe. PT Pupuk Iskandar Muda memiliki rencana pengembangan PIM 3 yang mencakup pembangunan Pabrik Amonia 3 dan Pabrik Urea 3 untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun, realisasi pengembangan tersebut masih memerlukan kepastian terkait pasokan gas, kapasitas penyimpanan, dan pemanfaatan infrastruktur pendukung yang tersedia.

Selain itu, PT Perta Arun Gas (PAG) memiliki rencana pengembangan kegiatan usaha sebagai LNG Hub, termasuk pembangunan tambahan tangki LNG untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pelayanan LNG.

Dalam monitoring juga diperoleh informasi mengenai rencana investasi Mubadala Energy (South Andaman) RSC Ltd (MESA) untuk pembangunan fasilitas Onshore Receiving Facility (ORF) di dalam kawasan dengan kebutuhan lahan sekitar 10 ha dan nilai investasi sekitar Rp713 miliar. Selain itu, terdapat rencana investasi dari PT Itochu berupa pembangunan fasilitas produksi blue ammonia dengan memanfaatkan teknologi elektrolisis air laut, dengan nilai investasi sekitar US\$90 juta atau setara dengan Rp1,6 triliun.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan rekomendasi peningkatan investasi di KEK Arun Lhokseumawe adalah sebesar Rp319,868,000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp36.426.816,00 atau sekitar 11,39 % dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu pengelolaan lahan eksisting yang telah terbangun masih belum optimal karena sebagian besar lahan masih berada di bawah penguasaan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Berdasarkan kendala dan capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu BUPP KEK dengan fasilitasi Gubernur Aceh sedang mengupayakan peralihan pengelolaan aset LMAN kepada Pemerintah Daerah Aceh untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan BUPP KEK.

1.5 Jumlah

Rekomendasi
Peningkatan Iklim
Investasi yang
Terselesaikan

Latar Belakang

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berperan sebagai instrumen strategis dalam mendorong peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan daya saing nasional, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pengembangan KEK yang

berkualitas dan berkelanjutan pada tahun 2026, pengembangan KEK perlu disesuaikan dengan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah, serta diarahkan pada kegiatan usaha utama yang memiliki nilai tambah ekonomi yang tinggi. Selain aspek pembentukan, pengembangan KEK juga perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik di dalam maupun di luar kawasan, serta pelayanan berstandar internasional guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan berusaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan KEK yang optimal, kompetitif, dan selaras dengan target pembangunan nasional, diperlukan rekomendasi pengembangan KEK yang komprehensif sejak tahap pengusulan, penetapan, hingga pengelolaannya, agar KEK dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian sasaran RPJMN dan transformasi ekonomi nasional.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi yang Terselesaikan	Jumlah	2	1	50%

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, asistensi, dan integrasi administrasi pada seluruh rangkaian kegiatan Setjen Denas KEK. Melaksanakan koordinasi dengan Setjen Denas KEK serta dengan mitra Kementerian/Lembaga yang terkait. Dukungan dan sinergi lintas sektor tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan implementasi program kerja, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan promosi investasi KEK di tingkat nasional maupun internasional. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi tahun 2026, berbagai capaian kinerja yang diukur melalui persentase penyelesaian program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung penyusunan kebijakan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan iklim investasi di kawasan KEK, yang dihitung dalam sebuah formula berikut,

(Σ Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi yang terselesaikan)

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melaksanakan kegiatan koordinasi dan asistensi kebijakan dengan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan dengan mitra K/L terkait, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Jumlah Rekomendasi Peningkatan Iklim Investasi yang Terselesaikan			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Koordinasi dengan mitra K/L dalam pembahasan kemudahan berinvestasi	Terlaksana	Pada Triwulan II telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penerbitan Persetujuan Ekspor PT PIM
2	Identifikasi kebutuhan penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) kemudahan berusaha di KEK	Terlaksana	Pada Triwulan II telah dilaksanakan rapat pembahasan identifikasi kebutuhan Penyusunan RKL dan RPL Rinci dan PKPLH di KEK
3	Pembahasan awal substansi pengembangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kemudahan berusaha di KEK	Terlaksana	Pada Triwulan II telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pedoman Penyusunan RKL dan RPL Rinci dan PKPLH di KEK

Pada Triwulan II tahun 2026, dalam rangka mendukung kemudahan berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus, telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Penerbitan Persetujuan Ekspor PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) untuk membahas dan menyelaraskan proses penerbitan persetujuan ekspor guna mendukung kelancaran kegiatan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Triwulan II juga telah dilaksanakan rapat internal pembahasan identifikasi kebutuhan penyusunan RKL dan RPL Rinci serta PKPLH di KEK sebagai langkah awal untuk mengidentifikasi kebutuhan, ruang lingkup, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam penyusunan dokumen dimaksud.

Selanjutnya, pada Triwulan II tahun 2026 telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Pedoman Penyusunan RKL dan RPL Rinci serta PKPLH di Sekjen Denas KEK untuk menyusun dan menyelaraskan pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan guna mendukung kepastian pelaksanaan kewajiban lingkungan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan rekomendasi peningkatan iklim investasi yang terselesaikan adalah sebesar Rp89.561.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp29.943.892,00 atau sekitar 33,43% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu belum adanya keseragaman konsep terkait dokumen persetujuan berdasarkan skala risiko dari Pelaku Usaha (PU) di KEK berdasarkan tingkat resiko. Sebagai upaya perbaikan, akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menyamakan persepsi, memperoleh masukan dari para pihak terkait, serta menyempurnakan pedoman penyusunan yang akan diterapkan.

2

Sasaran Program 2: Terwujudnya Layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Program 2, yaitu Terwujudnya Layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Kawasan Ekonomi Khusus yang Berkualitas yang dapat ditunjukkan dengan indeks kepuasan layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Indeks Kepuasan

Layanan Biro
Investasi, Kerja
Sama, dan
Komunikasi

Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima dan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Setjen KEK) melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan secara berkala. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan, khususnya investor, pelaku usaha, dan mitra kerja sama, sekaligus menjadi salah satu instrumen evaluasi dalam peningkatan kualitas pelayanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi	Indeks	3.1	3.28	105,86%

Indeks kepuasan layanan adalah metrik utama yang mengukur sejauh mana penerima layanan merasa puas terhadap layanan yang diberikan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi. Indeks kepuasan layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017.

Dalam pengukuran IKU-2.1, survei kepuasan layanan internal dilaksanakan pada Triwulan IV. Oleh karena itu, pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, komponen internal menggunakan target tahunan (3,1) sebagai nilai sementara dalam pengukuran kinerja. Hasil survei internal yang dilaksanakan pada Triwulan IV selanjutnya akan digunakan dalam pemutakhiran perhitungan Indeks Kepuasan Layanan pada akhir tahun. Pengukuran kinerja IKU-2.1 dilakukan berdasarkan hasil survei kepuasan layanan internal dan eksternal dengan bobot masing-masing sebesar 50%, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \sum((\text{Nilai unsur survey kepuasan layanan intenat} \times 50\%) + (\text{Nilai unsur survey kepuasan layanan eksternal} \times 50\%))$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk memastikan pelayanan yang diberikan kepada para pengguna layanan seperti investor, pelaku usaha, dan mitra kerja sama sudah sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

IKU-2.1 Indeks Kepuasan Layanan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Survei Kepuasan di Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyebaran survei kepuasan kepada stakeholder Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi

Pada Triwulan II Tahun 2026, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi melanjutkan pelaksanaan survei kepuasan layanan kepada stakeholder sebagai bagian dari rencana aksi IKU-2.1. Pelaksanaan survei dilakukan seiring dengan meningkatnya kegiatan dan interaksi Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi dengan stakeholder. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, jumlah responden yang telah mengisi survei secara kumulatif sebanyak 5 (lima) orang, meningkat dibandingkan Triwulan I yang berjumlah 2 (dua) orang.

Peningkatan jumlah responden tersebut menunjukkan bahwa penyebaran survei mulai menjangkau lebih banyak stakeholder. Survei akan tetap dilaksanakan secara berkelanjutan pada periode berikutnya untuk memperoleh masukan yang lebih beragam dan memberikan gambaran yang lebih representatif mengenai kepuasan pengguna layanan terhadap Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu jumlah responden survei masih terbatas karena penyebaran survei kepada stakeholder belum dilakukan secara masif. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah responden yang diperoleh sampai dengan Triwulan II belum optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan III tahun 2026, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan II tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai, yaitu penyebaran survei akan lebih diaktifkan dan diperluas kepada stakeholder yang berinteraksi dengan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi. Penyebaran survei juga akan dilakukan secara berkelanjutan pada setiap kegiatan yang melibatkan stakeholder untuk meningkatkan jumlah responden dan memperoleh hasil pengukuran yang lebih representatif.

3

Sasaran Program 3. Terwujudnya Pelaksanaan Fasilitas, Koordinasi, dan Diseminasi di Bidang Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi

Pencapaian Sasaran Program 3, yaitu Terwujudnya Pelaksanaan Fasilitas, Koordinasi, dan Diseminasi di Bidang Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi yang dapat ditunjukkan dengan persentase penyelesaian kesepakatan kerja sama institusi dalam dan luar negeri, persentase komunikasi publik dan promosi investasi yang dihasilkan, dan persentase dukungan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Latar Belakang

- | | |
|--|--|
| 3.1 Persentase Penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Institusi Dalam dan Luar Negeri | Dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang kompetitif, berkelanjutan, dan terintegrasi secara global, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi melaksanakan serangkaian kegiatan strategis, baik dalam bentuk penjajakan, pertemuan koordinasi, maupun pengembangan nota kesepahaman (MoU) dengan berbagai mitra internasional dan regional. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat sinergi kebijakan, membuka akses pendanaan proyek hijau, dan |
|--|--|

membangun jejaring kerja sama lintas sektor yang relevan dengan penguatan ekosistem investasi di KEK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Persentase Penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Institusi Dalam dan Luar Negeri	persentase	90%	68,58%	76.20%

Sebagai bagian upaya penguatan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang berdaya saing, inklusif, dan berwawasan lingkungan, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi telah melaksanakan serangkaian kegiatan strategis penjajakan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri. Kegiatan ini bertujuan untuk membuka peluang investasi, memperoleh dukungan teknis, serta memperkuat positioning KEK dalam agenda pembangunan nasional maupun global. Persentase penyelesaian ini bertujuan untuk melakukan kesepakatan kerja sama institusi dalam dan luar negeri, yang dihitung dalam sebuah formula berikut:

$$\%Persentase = \bar{x} \left(\frac{\sum \text{Penyelesaian kesepakatan kerja sama yang dihasilkan} \times \text{skoring tahapan}}{\text{Target} \sum \text{kesepakatan kerja sama}} \right) \times 70\% + \bar{x} \left(\frac{\sum \text{kegiatan implementasi kerja sama}}{\text{Target} \sum \text{kegiatan implementasi kerja sama}} \right) \times 30\%$$

Target kegiatan kesepakatan kerja sama yang ditetapkan Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi dalam satu tahun adalah 30 kegiatan, begitu juga dengan implementasi kerja sama, ditargetkan 30 kegiatan untuk satu tahun. Sehingga, setelah melakukan dokumentasi kegiatan, maka dapat diukur kinerja dari IKU 3.1 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \%Persentase &= \\ \bar{x} &\left(\frac{10 \text{ investaris kebutuhan} \times 0,25 + 7 \text{ penjajakan} \times 0,5 +}{30} \right) \times 70\% + \\ &\bar{x} \left(\frac{5 \text{ implementasi}}{30} \right) \times 30\% \\ \%Persentase &= 68,58\% \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai penyelenggaraan komunikasi publik di KEK. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melakukan pengembangan strategi promosi investasi dan kerja sama KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Persentase Penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Institusi Dalam dan Luar Negeri			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Penjajakan kerja sama dengan instansi luar negeri dalam rangka promosi investasi KEK	Terlaksana	Dilaksanakan melalui penjajakan dengan Singapore Embassy, BritCham, promosi investasi KEK di Eropa Timur dan Tengah, , serta penguatan jejaring dengan ACEF. Rencana aksi telah selesai pada Triwulan II.
2	Penjajakan kerja sama dalam rangka penyusunan kajian kebijakan investasi di KEK	Terlaksana	Dilaksanakan melalui penyusunan Master Plan TCTP Indonesia–Tiongkok, pembahasan Green SEZ Guidelines bersama GGGI, pembentukan EZWG BIMP-EAGA, koordinasi OECD, AIIB, ADB, Indonesia–Singapura.

			Rencana aksi telah selesai pada Triwulan II.
3	Monitoring kerja sama dengan instansi lainnya	Terlaksana	Monitoring dilakukan melalui pelaksanaan Six Bilateral Economic Working Groups Indonesia–Singapura, , Program VOCIFY Green Skills bersama Brithcam, Kerja Sama pencegahan Fraud di KEK bersama Kemenkeu, serta tindak lanjut implementasi berbagai kerja sama yang telah disepakati. Rencana aksi telah selesai pada Triwulan II.

Selama Triwulan II Tahun 2026, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi antara lain, bersama dengan Kemenko Perekonomian melakukan penguatan hubungan bilateral melalui Working Group on Trade, Investment and Industry (WGTII) Indonesia–Rusia, Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia–Kazakhstan, kerja sama ekonomi Indonesia–Singapura, serta penyusunan Master Plan Two Countries Twin Parks (TCTP) Indonesia–Tiongkok. Di tingkat regional dan multilateral, Biro IKK turut berpartisipasi dalam pembentukan Economic Zones Working Group (EZWG) BIMP-EAGA, persiapan Fact-Finding Mission OECD, serta berbagai forum yang diselenggarakan oleh ADB, AIIB, dan APEC.

Selain itu, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi juga memperkuat pengembangan Green Special Economic Zones (Green SEZ) melalui kerja sama dengan Global Green Growth Institute (GGGI) dan All-China Environment Federation (ACEF), penyusunan Green SEZ Guidelines, serta penyelenggaraan Workshop ADB bertajuk From Enclaves to Ecosystems: Green, Digital, and Integrated SEZs in Economic Corridors. Di bidang promosi investasi, kegiatan difokuskan pada penjajakan dengan calon investor dan asosiasi bisnis, promosi investasi KEK di kawasan Eropa Timur dan Tengah. Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi

juga turut serta mendukung penguatan tata kelola KEK melalui kerja sama pencegahan fraud dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi telah melaksanakan kegiatan penyelesaian kesepakatan kerja sama yang mencakup tahapan penjajakan, pembahasan substansi, hingga penyelesaian kesepakatan. Pada tahap penjajakan, kegiatan dilakukan melalui koordinasi dengan KUMPUL, platform ekosistem inovasi dan kewirausahaan yang berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara pelaku usaha (start-up dan UMKM), investor, mentor, serta mitra global, Singapore Embassy, persiapan Sidang Komite Bersama (SKB) Indonesia–Kazakhstan, pembentukan Economic Zones Working Group (EZWG) BIMP-EAGA, serta persiapan seminar promosi investasi KEK di Eropa Timur dan Tengah. Tahap pembahasan substansi meliputi persiapan dan finalisasi Working Group Trade Industry and Investment (WGTII) Indonesia–Rusia, persiapan pertemuan bilateral Indonesia–Singapura, penyusunan Master Plan Two Countries Twin Parks (TCTP) Indonesia–Tiongkok, pembahasan Green SEZ Guidelines bersama GGGI, kerja sama dengan ACEF, serta persiapan Workshop ADB dan Fact-Finding Mission OECD. Adapun pada tahap penyelesaian, telah terlaksana Pertemuan ke-7 WGTII Indonesia–Rusia, Senior Official Meeting dan Ministerial Meeting Indonesia–Singapura.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan penyelesaian kesepakatan kerja sama institusi dalam dan luar negeri adalah sebesar Rp309.849.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp107.002.414,00 atau sekitar 34,53% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Penyelesaian dokumen kerja sama memerlukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta persetujuan mitra internasional sehingga

proses harmonisasi substansi membutuhkan waktu yang relatif panjang.

2. Beberapa inisiatif kerja sama, khususnya pengembangan Green SEZ dan TCTP, masih memerlukan penyesuaian terhadap perkembangan kebijakan nasional, regulasi investasi, dan mekanisme pendanaan.
3. Jadwal penyelenggaraan forum bilateral maupun multilateral sangat bergantung pada kesiapan dan proses pengambilan keputusan masing-masing negara maupun organisasi internasional sehingga memengaruhi percepatan penyelesaian kerja sama.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan III tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat koordinasi dan harmonisasi dengan kementerian/lembaga serta mitra internasional melalui penyusunan timeline penyelesaian kerja sama yang lebih terstruktur.
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap setiap tahapan kerja sama, termasuk percepatan tindak lanjut hasil pertemuan bilateral dan multilateral agar segera memasuki tahap implementasi.
3. Memperluas jejaring kemitraan dengan organisasi internasional, lembaga pembangunan, asosiasi bisnis, dan sektor swasta untuk meningkatkan peluang investasi, transfer pengetahuan, serta implementasi program yang mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

3.2 Persentase

Komunikasi Publik
dan Promosi
Investasi yang
dihasilkan

Latar Belakang

Komunikasi publik dan promosi investasi merupakan salah satu instrumen strategis dalam mendukung pengembangan KEK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Pelaksanaan komunikasi publik yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, pelaku usaha, investor, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra internasional terhadap kebijakan, capaian, dan potensi investasi KEK.

Sejalan dengan arahan Pemerintah dalam mendorong investasi berkualitas dan percepatan hilirisasi industri, kegiatan komunikasi publik dan promosi investasi diarahkan untuk memperkuat citra positif KEK, meningkatkan eksposur peluang investasi, serta memperluas jangkauan informasi kepada target audiens secara tepat dan terukur.

Pengukuran Persentase Komunikasi Publik dan Promosi Investasi yang dihasilkan dilakukan sebagai indikator untuk menilai efektivitas pelaksanaan publikasi, penyebaran informasi, promosi investasi, serta ketercapaian output komunikasi yang telah direncanakan dalam periode kinerja berjalan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 Persentase Komunikasi Publik dan Promosi Investasi yang dihasilkan	persentase	90%	80,88%	89,86%

$$\begin{aligned} \%Persentase = \bar{x} &= \left(\frac{\Sigma \text{ publikasi berita}}{\text{Target } \Sigma \text{ publikasi berita}} \times 30\% \right) + \left(\frac{\Sigma \text{ publikasi konten}}{\text{Target } \Sigma \text{ publikasi konten}} \times 30\% \right) + \\ &+ \left(\frac{\Sigma \text{ pelaksanaan kegiatan promosi}}{\text{Target } \Sigma \text{ pelaksanaan kegiatan promosi}} \times 20\% \right) + \\ &+ \left(\frac{\Sigma \text{ tindak lanjut permintaan informasi}}{\Sigma \text{ permintaan informasi yang masuk}} \times 20\% \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \%Persentase &= \left(\frac{33}{74} \times 30\% \right) + \left(\frac{130}{120} \times 30\% \right) + \left(\frac{9}{12} \times 20\% \right) + \left(\frac{5}{5} \times 20\% \right) \\ \%Persentase &= 80,88\% \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melakukan penyelenggaraan komunikasi dan sistem informasi di KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Komunikasi Publik dan Promosi Investasi yang dihasilkan

No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Produksi konten interaktif/konten kolaborasi	Terlaksana	Telah terpublikasi sebanyak 88 konten di sosial media KEK, meliputi Instagram dan TikTok.
2	Monitoring <i>traffic</i> pada media sosial	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring <i>traffic</i> pada media sosial yang menunjukkan peningkatan jangkauan publik melalui kenaikan jumlah <i>views</i> sebesar sekitar 1.130%.
3	Monitoring isu pada media sosial	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring isu pada media dan terdapat 23 topik terkait KEK.
4	Menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyampaian jawaban atas lima permohonan informasi yang masuk.
5	Monitoring PPID	Terlaksana	Telah dilaksanakan penetapan Keputusan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Denas, Setjen Denas, dan Administrator KEK.
6	Peningkatan intensitas penyusunan rilis berita KEK	Terlaksana	Telah terpublikasi sebanyak 23 siaran pers di kanal website kek.go.id .
7	Monitoring berita yang beredar	Terlaksana	Telah dilakukan monitoring berita yang

			beredar, serta menunjukkan 561 pemberitaan terkait KEK.
8	Pelaksanaan kegiatan promosi investasi	Terlaksana	Telah dilaksanakan lima kegiatan promosi investasi melalui keikutsertaan sebagai narasumber pada berbagai forum nasional dan internasional.

Pada Triwulan II Tahun 2026 telah dilaksanakan berbagai rencana aksi yang berfokus pada penguatan komunikasi publik, pengelolaan informasi, monitoring media, serta promosi investasi KEK. Seluruh rencana aksi tersebut telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan.

Pada aspek komunikasi digital, tim komunikasi telah memproduksi dan menayangkan sebanyak 88 konten melalui media sosial resmi KEK, yaitu Instagram dan TikTok. Konten yang disajikan mencakup informasi kebijakan, dokumentasi kegiatan, edukasi mengenai KEK, serta konten kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai upaya meningkatkan jangkauan informasi dan *engagement* masyarakat terhadap perkembangan KEK.

Untuk mendukung efektivitas strategi komunikasi digital dan mengevaluasi jangkauan penyebaran informasi melalui media sosial resmi KEK, dilakukan monitoring terhadap *traffic* media sosial, khususnya pada platform Instagram dan TikTok. Hasil monitoring menunjukkan bahwa jumlah tayangan (*views*) meningkat dari 99.783 *views* pada Triwulan I menjadi 1.048.628 *views* pada Triwulan II, atau mengalami peningkatan sebesar 950,9%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi digital yang diterapkan semakin efektif dalam memperluas jangkauan informasi mengenai KEK.

Peningkatan jumlah *views* pada Triwulan II didominasi oleh performa konten di platform Instagram, khususnya konten yang dipublikasikan melalui fitur Instagram Collab bersama Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK maupun kementerian/lembaga. Melalui fitur tersebut, konten ditampilkan secara bersamaan pada akun resmi para

pihak yang berkolaborasi sehingga mampu menjangkau audiens yang lebih luas dan meningkatkan eksposur informasi secara organik.

Beberapa konten dengan capaian *views* tertinggi antara lain "Kenalan dengan KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten" yang memperoleh 431.982 *views*, "Beasiswa LPDP di KCL Singhasari" dengan 301.043 *views*, serta "Topping Off Ceremony of Medical Suites at D-HUB SEZ" yang memperoleh 116.228 *views*. Tingginya jumlah tayangan pada konten-konten tersebut menunjukkan bahwa strategi publikasi kolaboratif tidak hanya memperluas jangkauan audiens melalui basis pengikut masing-masing mitra, tetapi juga meningkatkan kredibilitas informasi dan mendorong interaksi pengguna. Oleh karena itu, pemanfaatan fitur Instagram Collab dengan BUPP KEK, kementerian/lembaga, dan mitra strategis lainnya akan terus dioptimalkan sebagai salah satu strategi komunikasi digital untuk meningkatkan efektivitas diseminasi informasi dan memperluas jangkauan publikasi KEK.

Monitoring isu pada media sosial turut dilakukan secara berkala guna mengidentifikasi isu strategis, tren pemberitaan, serta eksposur media terhadap berbagai perkembangan KEK. Hasil monitoring tersebut menjadi dasar dalam penyusunan strategi komunikasi yang lebih efektif dan responsif. Pada Triwulan II Tahun 2026, terdapat 23 topik pemberitaan, dengan topik yang paling banyak mendapat sorotan media yaitu Indonesia Financial Center (IFC), Keyword KEK, KEK Gresik, KEK Industropolis Batang, KEK Kura-Kura Bali, Perluasan KEK, KEK Arun Lhokseumawe, KEK ETKI Banten, KEK Bitung, KEK Galang Batang, serta KEK Halal Sidoarjo.

Dalam mendukung keterbukaan informasi publik, kami telah menerima dan menindaklanjuti setiap permohonan informasi yang disampaikan melalui surat resmi maupun email info@kek.go.id. Tercatat sebanyak lima permohonan informasi yang telah ditindaklanjuti, dengan rincian tiga permohonan melalui email dan dua permohonan melalui disposisi surat resmi melalui aplikasi Srikandi. Seluruh permohonan informasi diproses melalui koordinasi dengan unit kerja terkait agar informasi yang diberikan bersifat akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola keterbukaan informasi publik, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan monitoring terhadap pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara terstruktur. Koordinasi lintas unit telah dijalankan melalui

empat kali rapat yang bertujuan untuk menyamakan persepsi antar unit kerja, menyelesaikan penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), serta menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID sebagai acuan resmi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, dan Administrator KEK. Hasil dari proses koordinasi tersebut telah terdokumentasi secara sistematis dan dikumpulkan ke dalam database internal. Sebagai tindak lanjut, data tersebut akan diproses untuk dapat ditayangkan pada website PPID, sehingga seluruh informasi publik dapat diakses dengan mudah, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Pada aspek publikasi media, telah diterbitkan sebanyak 23 siaran pers melalui website resmi kek.go.id sebagai sarana diseminasi informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Publikasi tersebut mengangkat berbagai isu strategis, antara lain penguatan peran KEK dalam mendorong investasi, hilirisasi industri, transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI), pengembangan industri hijau, penguatan sektor kesehatan dan pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kerja sama internasional, serta percepatan pengembangan berbagai KEK di Indonesia. Selain itu, siaran pers juga memuat berbagai capaian investasi, seperti pembangunan pabrik melamin pertama di KEK Gresik, pengembangan kawasan kesehatan di KEK ETKI Banten, pengembangan KEK Tanjung Lesung, Kendal, Palu, Industropolis Batang, Kura Kura Bali, Sanur, Singhasari, hingga penguatan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui siaran pers tersebut, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK berupaya meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas jangkauan komunikasi publik, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap perkembangan dan prospek KEK di Indonesia.

Secara keseluruhan, terdapat 561 pemberitaan terkait KEK dengan dominasi tonasi positif sebanyak 178 berita (59%), tonasi netral sebanyak 176 berita (37%), dan tonasi sensitif sebanyak 19 berita (4%). Adapun jumlah pemberitaan terkait KEK tercatat sebanyak 157 pemberitaan pada April, 181 pemberitaan pada Mei, dan 223 pemberitaan pada Maret 2026. Pemberitaan pada periode ini didominasi oleh tonasi positif. Pemberitaan banyak mengangkat upaya pemerintah dalam memperkuat daya saing investasi melalui pengembangan IFC, penyusunan regulasi KEK sektor keuangan, serta berbagai insentif untuk menarik investasi berkualitas dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat jasa keuangan regional.

Pemberitaan positif lainnya menyoroti rencana perluasan KEK Gresik, KEK Kendal, dan KEK Galang Batang sebagai respons terhadap tingginya minat investasi, dengan potensi investasi mencapai sekitar Rp894 triliun. Selain itu, media juga menyoroti penguatan sektor industri melalui *groundbreaking* pabrik melamin pertama dan terbesar di Indonesia oleh PT GEABH Joint Technology di KEK Gresik, serta capaian investasi dan penyerapan tenaga kerja di KEK Kendal dan pengembangan konektivitas logistik melalui *dry port* di KEK Industropolis Batang.

Di sisi lain, pemberitaan juga menyoroti sejumlah isu sensitif terkait pengembangan IFC di Bali. Sorotan media berfokus pada wacana pemberian insentif fiskal, termasuk opsi tarif pajak 0% yang memunculkan persepsi sebagai *tax haven*, serta perhatian terhadap aspek lingkungan, tata ruang, dan tata kelola dalam pengembangan kawasan. Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan IFC ditujukan untuk meningkatkan daya saing investasi Indonesia dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap regulasi.

Sementara itu, pada Triwulan II Tahun 2026, telah terlaksana 5 (lima) kegiatan promosi investasi melalui partisipasi dalam berbagai forum nasional dan internasional sebagai narasumber maupun pembicara untuk memperkenalkan potensi KEK. Kegiatan tersebut antara lain meliputi forum bertema transformasi digital dan kecerdasan artifisial (AI), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, forum promosi investasi di kawasan Eropa, peninjauan kerja sama investasi dengan investor Hungaria bersama KEK Industropolis Batang, serta forum kerja sama Indonesia–Singapura dalam mendorong investasi digital dan pengembangan industri melalui KEK. Pelaksanaan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan eksposur potensi KEK, memperluas jejaring kerja sama, serta mendorong masuknya investasi KEK di Indonesia.

Secara keseluruhan, pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa berbagai upaya komunikasi publik dan promosi investasi telah terlaksana secara optimal melalui penguatan komunikasi digital, peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, monitoring media yang berkelanjutan, publikasi informasi strategis, serta partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan promosi investasi. Pelaksanaan rencana aksi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas diseminasi informasi,

memperkuat citra positif Kawasan Ekonomi Khusus, serta mendukung peningkatan minat investasi di Indonesia.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan komunikasi publik dan promosi investasi adalah sebesar Rp350.901.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp233.973.038,00 atau sekitar 66,68% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Jangkauan konten media sosial belum merata pada seluruh jenis konten. Sebagian besar peningkatan *views* masih didominasi oleh konten yang dipublikasikan melalui fitur *Instagram Collab*, sedangkan konten reguler belum memiliki tingkat jangkauan yang setara.
2. Penyebaran informasi mengenai KEK masih perlu diperluas kepada masyarakat umum. Informasi mengenai kebijakan dan perkembangan KEK masih didominasi oleh audiens yang telah memiliki ketertarikan terhadap isu investasi dan ekonomi.
3. Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), SOP, dan pengembangan database informasi masih memerlukan penyempurnaan sebelum seluruh informasi dapat dipublikasikan melalui website PPID.
4. Monitoring isu dan pemberitaan yang dilakukan telah mampu mengidentifikasi sentimen pemberitaan, namun analisis tren isu dan rekomendasi tindak lanjut masih perlu terus dikembangkan.
5. Promosi investasi masih memerlukan perluasan jejaring kerja sama.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan II tahun 2026 agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Meningkatkan kualitas dan kreativitas konten organik, mengoptimalkan pemanfaatan fitur media sosial (Reels, Carousel, Stories), serta memperbanyak kolaborasi dengan BUPP KEK, kementerian/lembaga, dan mitra strategis lainnya.

2. Menyusun strategi komunikasi yang lebih adaptif dengan memproduksi konten yang lebih edukatif, mudah dipahami, dan sesuai karakteristik target audiens yang lebih luas.
3. Melanjutkan koordinasi lintas unit kerja, menyelesaikan finalisasi DIP dan SOP PPID, serta mempercepat pengembangan website PPID agar pelayanan informasi publik semakin optimal.
4. Meningkatkan kualitas monitoring media melalui analisis tren pemberitaan, pemetaan isu strategis, dan penyusunan rekomendasi komunikasi sebagai dasar pengambilan kebijakan komunikasi publik.
5. Memperluas partisipasi pada forum investasi nasional maupun internasional, memperkuat sinergi dengan kementerian/lembaga, asosiasi usaha, serta calon investor potensial untuk meningkatkan eksposur KEK.

3.3 Persentase

Dukungan
terhadap
Penyelenggaraan
Layanan Informasi
Publik

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik, ketersediaan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang transparan, akuntabel, dan responsif. Dukungan ini berperan strategis dalam meningkatkan kepercayaan investor, memperluas peluang kerja sama, serta mendukung pengambilan kebijakan yang tepat.

Bentuk dukungan terhadap layanan informasi publik di KEK diwujudkan melalui pengelolaan sistem informasi dan kanal resmi, seperti website KEK yang menyediakan informasi terkait regulasi, profil kawasan, serta peluang investasi dan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, dukungan juga mencakup penguatan aspek keamanan sistem melalui pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) guna memastikan layanan informasi dapat berjalan dengan lancar, aman, dan berkelanjutan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.3 Persentase Dukungan terhadap Penyelenggaraan Layanan	Persentase	90%	53,00%	58,89%

Informasi Publik				
------------------	--	--	--	--

Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi memiliki tugas dalam pelayanan informasi dan komunikasi publik, penyiapan data dan sistem informasi, serta integrasi sistem informasi dalam mendukung pelayanan kepada investor dan pemangku kepentingan. Kegiatan yang dilakukan mencakup dukungan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik melalui pengelolaan kanal informasi, penguatan sistem, dan penyediaan data yang akurat serta mudah diakses.

Persentase dukungan ini bertujuan untuk mengukur tingkat dukungan terhadap penyelenggaraan layanan informasi publik yang andal, terintegrasi, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, yang dihitung dalam formula berikut,

$$\%Persentase = \bar{x} \left(\frac{\Sigma \text{Laporan Pemeliharaan Website KEK}}{\text{Target } \Sigma \text{ Laporan}} \right) \times 40\% + \left(\frac{\Sigma \text{Laporan Pengembangan Website PPID}}{\text{Target } \Sigma \text{ Laporan}} \right) \times 30\% + \left(\frac{\Sigma \text{Laporan Progress TTIS}}{\text{Target } \Sigma \text{ Laporan}} \right) \times 30\%$$

Target laporan yang ditetapkan oleh Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi dalam satu tahun meliputi 4 laporan pemeliharaan website KEK, 5 laporan pengembangan website PPID, serta 4 laporan terkait upaya pembentukan TTIS. Berdasarkan capaian output dari laporan kegiatan tersebut, kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) 3.4 dapat diukur sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \%Persentase &= \bar{x} \left(\frac{2}{4} \right) \times 40\% + \left(\frac{3}{5} \right) \times 30\% + \left(\frac{2}{4} \right) \times 30\% \\ &= 53,00\% \end{aligned}$$

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik di KEK. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

3.3 Persentase Dukungan terhadap Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Identifikasi kebutuhan pengembangan website kek.go.id	Terlaksana	Telah dilakukan identifikasi pengembangan website kek.go.id yang disusun dalam bentuk nota dinas laporan
2	Pengujian fungsionalitas website PPID	Terlaksana	Telah dilakukan pengujian dan penyusunan user manual (admin dan umum) sebagai dokumentasi pengembangan
3	Pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan penyiapan dokumen registrasi	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dengan dalam rangka pembentukan THIS dan penyiapan dokumen registrasi ke BSSN

Persentase capaian pada Triwulan II Tahun 2026 ditunjukkan dengan terlaksananya seluruh rencana aksi yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 4 laporan. Kegiatan identifikasi kebutuhan pengembangan website kek.go.id telah menghasilkan dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan yang disusun dalam bentuk Nota Dinas sebagai dasar penyusunan rencana pengembangan website pada tahap selanjutnya. Selanjutnya, pada kegiatan pengujian fungsionalitas website PPID, telah dilakukan pengujian terhadap fitur-fitur utama website serta penyusunan user manual bagi administrator dan pengguna umum sebagai dokumentasi teknis. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan website PPID serta mendukung keberlanjutan pengembangan sistem.

Pada kegiatan pembentukan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) dan penyiapan dokumen registrasi, Tim THIS telah melaksanakan koordinasi dan finalisasi dokumen registrasi bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebagai output kegiatan, telah dilaporkan hasil kegiatan berupa nota dinas dan telah disusun dokumen registrasi TTIS yang meliputi Surat Permohonan Pendaftaran TTIS, Formulir Registrasi Tim Tanggap Insiden Siber, Surat Keputusan Tim Tanggap Insiden Siber, Dokumen RFC 2350, Dokumen Sumber Daya Penyelenggara TTIS, Surat Pernyataan Narahubung, serta Nota Dinas Laporan Hasil Finalisasi Dokumen Registrasi. Dokumen tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan registrasi SEZ-CSIRT kepada Badan Siber dan Sandi Negara pada Triwulan III Tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya, utamanya adalah efisiensi penggunaan anggaran. Pagu anggaran revisi dari serangkaian kegiatan komunikasi publik dan promosi investasi adalah sebesar Rp90.208.000,00 yang hingga Triwulan II Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp18.782.500,00 atau sekitar 20,82% dari PAGU anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut yaitu pengembangan website memerlukan koordinasi lintas unit untuk memastikan kebutuhan pengguna dan aspek keamanan sistem telah terakomodasi secara optimal.

Berdasarkan kendala dimaksud, adapun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada Triwulan III yaitu melanjutkan pengembangan website berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan berkoordinasi ke unit pengampu infrastruktur dan penyedia jasa sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Program 4 adalah terwujudnya tata kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi yang Baik, yang dituangkan dalam indikator berupa persentase kualitas pelaksanaan anggaran Biro Investasi, Kerja Sama dan Komunikasi.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Indeks Tata

Kelola Biro
Investasi, Kerja
Sama, dan
Komunikasi

Latar Belakang

Pelaksanaan fasilitasi, koordinasi, dan diseminasi di bidang investasi, kerja sama, dan komunikasi memegang peranan penting dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Untuk memastikan keberhasilan kegiatan tersebut, diperlukan tata kelola yang baik, mencakup kebijakan, prosedur, serta praktik administrasi program yang mampu meningkatkan kualitas kinerja biro. Pengelolaan yang terintegrasi melalui manajemen internal yang solid, didukung sarana dan prasarana kerja yang memadai, sumber daya manusia yang profesional, serta sistem perencanaan dan penyusunan bahan kebijakan yang tepat dan akurat, menjadi faktor penentu tercapainya sasaran strategis ini. Selain itu, pengelolaan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien juga menjadi pilar penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran berjalan optimal dan akuntabel.

Hasil Pengukuran Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Indeks Tata Kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi	Persentase	3 (skala 4)	3	100,00%

Indeks kualitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang peningkatan investasi, kerja sama, komunikasi, dan sistem informasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai tingkat yang sangat memuaskan. Dalam melaksanakan program-program ini, terjadi kolaborasi yang sinergis antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sektor swasta, dan lembaga terkait. Koordinasi yang baik memastikan adanya keselarasan dalam strategi peningkatan investasi, sementara sinkronisasi yang efisien memperkuat integritas dan sinergi antara berbagai aspek operasional. Pengendalian yang cermat dalam pelaksanaan proyek

investasi, kerja sama, komunikasi, dan sistem informasi menjadi landasan kuat dalam mencapai keberhasilan ini. Dengan adanya indeks kualitas yang tinggi, KEK mampu menarik investasi, menciptakan kerja sama yang berkelanjutan, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan memperkuat sistem informasi, membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, yang dihitung dalam sebuah formula perhitungan berikut,

Indeks Tata Kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi = (Capaian Realisasi Anggaran x 45%) + (Capaian Output x 45%) + (Pengembangan SDM x 10%)

Realisasi anggaran Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi berdasarkan SP2D (cash basis) hingga Triwulan II sebesar Rp600.066.233,00 dari pagu anggaran sebesar Rp2.111.685.000,00 atau mencapai 28,42%. Persentase tersebut diperoleh dari perbandingan antara realisasi anggaran dengan total pagu anggaran. Sementara itu, target penyerapan anggaran berdasarkan Aplikasi MyIntress pada Triwulan II sebesar 50%.

- $$\begin{aligned}\text{Capaian Realisasi Anggaran} &= \frac{\text{Realisasi Anggaran SP2D}}{\text{Target Penyerapan Anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{28,42\%}{50\%} \times 100\% \\ &= 56,84\%\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\text{Capaian Output} &= \text{Capaian Output sesuai Aplikasi SAKTI} \\ &= 100\%\end{aligned}$$

- $$\begin{aligned}\text{Pengembangan SDM} &= \frac{\Sigma \text{SDM yang melaksanakan Pembelajaran 20 JP}}{\Sigma \text{SDM Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi}} \times 100\% \\ &= \frac{12}{27} \times 100\% \\ &= 44,44\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Indeks Tata Kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi} &= (\text{Capaian Realisasi Anggaran} \times 45\%) + (\text{Capaian Output} \times 45\%) + (\text{Pengembangan SDM} \times 10\%) \\ &= (56,84\% \times 45\%) + (100\% \times 45\%) + (44,44\% \times 10\%) \\ &= 25,58\% + 45,00\% + 4,44\% \\ &= 75,02\%\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran, capaian sebesar 75,02% dikategorikan ke dalam indeks 3 (Cukup) sesuai rentang penilaian indeks tata kelola yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi, Capaian Program dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kualitas dan kesesuaian pelaksanaan kinerja Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Kawasan Ekonomi Khusus. Indikator kinerja ini secara lebih lanjut bertujuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dan pelaksanaan rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 sebagai berikut:

IKU 4.1 Indeks Tata Kelola Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Melaksanakan rencana kegiatan dan belanja	Terlaksana	Telah dilaksanakan rencana kegiatan dan belanja sesuai dengan perencanaan.
2.	Melaksanakan kegiatan dalam rangka mencapai output yang diharapkan	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dalam rangka mencapai output yang diharapkan.
3.	Mendokumentasikan capaian output	Terlaksana	Telah dilakukan dokumentasi terhadap capaian output kegiatan.
4.	Pelaporan Capaian Output dan e-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan pelaporan capaian output dan e-Monev.
5.	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi ASN secara klasikal	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN secara

	dan/atau nonklasikal		klasikal dan/atau nonklasikal dalam rangka peningkatan kapasitas.
--	----------------------	--	---

Pelaksanaan seluruh rencana aksi Triwulan II Tahun 2026 telah terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada Triwulan II, pelaksanaan kegiatan dan belanja telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian output yang diharapkan, dengan memastikan setiap pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, telah dilakukan dokumentasi terhadap capaian output sebagai bagian dari bukti pelaksanaan kegiatan dan bahan pendukung dalam proses pemantauan serta evaluasi kinerja.

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, telah dilaksanakan pelaporan capaian output dan pemutakhiran data melalui e-Monev sesuai dengan pelaksanaan kegiatan. Pelaporan tersebut dilakukan sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja serta untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan, output yang dihasilkan, dan perencanaan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi ASN secara klasikal dan/atau nonklasikal guna mendukung peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sampai dengan Triwulan II, sebanyak 12 (dua) orang ASN yang telah memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi sebanyak 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP), sementara ASN lainnya juga telah mulai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dan secara bertahap memenuhi kewajiban 20 JP.

Pagu anggaran Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi untuk kegiatan Koordinasi Peningkatan Investasi, Kerja Sama, Komunikasi, dan Sistem Informasi KEK sebesar Rp2.111.680.000,00. Hingga Triwulan II Tahun 2026, anggaran yang telah terealisasi sebesar Rp600.066.233,00 atau sebesar 28,42% dari pagu anggaran.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II, belum terdapat kendala signifikan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari kelancaran pelaksanaan kegiatan serta peningkatan jumlah ASN yang telah memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi.

Jakarta, Juli 2026

Plt. Kepala Biro Investasi, Kerja
Sama, dan Komunikasi,



Bambang Wijanarko

NIP. 197804291999121001 